



# Kabar Pengawas

## Kabupaten Pacitan



**BULETIN**  
BAWASLU KABUPATEN PACITAN

## Bawaslu Agendakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Pemilu sudah menjadi bagian integral historis pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Namun, pada faktanya partisipasi politik rakyat dalam pelaksanaan demokrasi selama ini dimaknai terbatas, yakni cukup dengan hanya memberikan hak pilihnya di TPS saja. Diharapkan melalui Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif tingkat

**Terbit Setiap Bulan**

Diterbitkan Oleh :  
Divisi Kehumasan  
Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Sekretariat :  
Jalan MT. Haryono, No.  
60 Ploso Pacitan, Telp  
(0357)884330

[www.pacitan.bawaslu.go.id](http://www.pacitan.bawaslu.go.id)

kesadaran masyarakat dapat meningkat terutama dalam hal pengawasan Pemilu/Pilkada.



Ketua beserta Anggota Bawaslu dan KPU Kabupaten Pacitan

## Bawaslu Dan KPU Jatim Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019 Seluruh Kab/Kota Se- Jawa Timur

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan kapasitas penyelenggara Pemilu di Jawa Timur Bawaslu Jatim Gelar Rakor Evaluasi Penyelenggara Pemilu 2019, 2 s.d 4/11/2019 bertempat di Hotel Wyndham Surabaya.

Acara tersebut digelar pertama kali oleh Bawaslu Jatim yang berhasil mengumpulkan Bawaslu dan KPU Kab/Kota se-Jawa Timur secara bersamaan. Dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu RI menyampaikan bahwa evaluasi penyelenggaraan Pemilu memang penting untuk memperbaiki

kekurangan yang ada. "Dengan evaluasi ini kita bisa membuka diri atas kekurangan kita dan bisa memperbaikinya", ungkapnya.

Lebih lanjut Ketua Bawaslu RI juga berharap bahwa kegiatan bersama antara KPU dan Bawaslu juga perlu diterapkan hingga ke tingkat bawah (Ad-Hoc), mulai Panwascam dengan PPK, PPL dengan PPS hingga PTPS dengan KPPS. "Beberapa persoalan muncul dari bawah maka perlu adanya penyamaan persepsi dari tingkat bawah", imbuhnya.

Perlu diketahui acara tersebut juga dihadiri oleh

Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU RI, Ketua DKPP, Komisi II DPR RI, Ketua Anggota Bawaslu se-Jatim, Ketua Anggota KPU se-Jatim dan seluruh OPD dan stake holder yang telah bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan dari Bawaslu Jawa Timur sebagai mitra dalam menyukseskan Pemilu 2019 di antaranya Gubernur Provinsi Jawa Timur, Komandan daerah Militer V/ Brawijaya, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Timur, KPID Provinsi Jawa

Timur, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, Komisi Informasi Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur, Bakesbangkpol, KPPN Surabaya 1, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dan Kanwil BRI Surabaya.

Tak lupa Bawaslu Jawa Timur juga memberikan penghargaan kepada jajarannya. Untuk kategori SDM terbaik diraih oleh Kabupaten Situbondo, kategori Kinerja Pengawasan Terbaik oleh Kabupaten Sidoarjo, kategori Inovasi Pencegahan Terbaik oleh Kabupaten Blitar, kategori Inovasi Pengawasan Terbaik oleh Kabupaten Pasuruan,

kategori Penanganan Pelanggaran Pidana oleh Kabupaten Mojokerto, Kategori Gakkumdu Terbaik oleh Kabupaten Sampang, kategori Penanganan Pelanggaran Administrasi oleh Kabupaten Malang, kategori mediator terbaik oleh Probolinggo, kategori Penyelesaian Sengketa Terbaik oleh Kabupaten Sidoarjo, kategori Pelaksana Fungsi Humas dan Hubal oleh Kabupaten Ponorogo, kategori Penyusunan dan pemberian Keterangan Terbaik dan Tata Kelola Kesekretariatan di dapatkan oleh Kabupaten Bangkalan. *(Humas Bawaslu Pacitan)*



**KPU & BAWASLU KAB. PACITAN**



## Evaluasi Pemberian Keterangan Tertulis : Ada 3 Hal Yang Harus Dipersiapkan

**B**ertujuan untuk meningkatkan keahlian Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Bawaslu Jatim Gelar Rakor Evaluasi Penulisan Keterangan Tertulis sesuai dengan Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018. 6 s.d 8/11/2019 bertempat di Surya Hotel & Cottages Pasuruan.

Koordinator Devisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Jatim, Purnomo Satrio Pringgodigdo dalam penyampaian materinya mengatakan bahwa bagi 19 Kab/Kota di Jawa Timur yang akan menghadapi Pilkada harus mempersiapkan diri. Karena, dapat dimungkinkan bisa terjadi PHPU.

Purnomo juga menyampaikan bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan dan dipahami dalam pemberian keterangan tertulis. Pertama, Persiapan alat bukti. Kedua, penyusunan keterangan terlulisnya. Ketiga, persiapan dan pelaksanaan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pada Kesempatan tersebut juga disinggung pengalaman yang telah dilalui oleh Bawaslu se-Jawa Timur dalam menghadapi PHPU di Pemilu 2019 kemarin. "Kami semua telah berjuang berdarah-darah dan saya ukur effort teman-teman dari proses persiapan hingga persidangan telah berusaha semaksimal mungkin". Ungkap Purnomo

Tak lupa Purnomo juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bawaslu Kab/Kota di Jatim. Sehingga pada Bawaslu Award yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI kemarin, Bawaslu Jatim terpilih sebagai pemberi keterangan tertulis terbaik di Mahkamah Konstitusi. "Saya berharap, kita bisa memberikan hal yang jauh lebih baik lagi dalam pemberian keterangan tertulis selanjutnya" ungkap Pria kelahiran Surabaya itu dalam penutupan materinya. *(Humas Bawaslu Pacitan)*



Rakor Manajemen Keterbukaan Informasi Publik

## Bawaslu Pacitan Buka Permohonan Informasi Secara Online Dan Offline

**B**ertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik Bawaslu sebagai salah satu lembaga publik. Bawaslu Jatim adakan Rapat Koordinasi Manajemen Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. 15 s.d 17 November 2019 bertempat di Hotel C1 Sumenep Madura.

Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Jatim mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban Bawaslu sebagai lembaga publik atau lembaga negara yang menggunakan anggaran negara, kita harus bisa membuka diri atas informasi yang ada di Bawaslu. "Konsekuensi paling ringan jika tidak mau membuka diri kita akan disengketakan" Tegag Perempuan

yang kerap disapa Elly tersebut dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, dalam penyampaian materinya mengatakan bahwa pada dasarnya semua informasi bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan informasi yang bersifat ketat dan terbatas berdasarkan pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik, selain itu harus melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. " Informasi yang bersifat dikecualikan akan berkonsekuensi negatif ketika dibuka dan kebalikannya apabila informasi yang bersifat terbuka akan berkonsekuensi negatif jika ditutup atau tidak diberikan" Tegag Alamsyah.

*(Humas Bawaslu Pacitan)*



## Ajak Masyarakat Awasi Pemilu, Bawaslu Pacitan Gelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting guna meningkatkan kualitas pemilu. Untuk mencapai tujuan itu Bawaslu Kabupaten menggelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari bertempat di Hotel Graha Pacitan, Rabu (27/11/2019).

Wakil Bupati Pacitan Yudi Sumbogo saat membuka acara berharap nantinya para kader ini dapat membantu dan aktif mengawasi Pemilu secara partisipatif. "Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran saat pelaksanaan pemilu maupun pilkada." ujarnya dalam sambutan.

Tampak hadir juga Heru Setiyanto, Anggota DPRD Pacitan, Kasdim 0801 Mayor Inf. Tomy Fedy Anugrahan, Wakapolres Kumpul Sunardi, Ketua KPU, Asisten 1 Bupati, Anggota Bawaslu.

Sementara itu Berty Stevanus HRW, Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan menjelaskan jika Sekolah Kader ini salah satu target Bawaslu Pacitan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pilkada Pacitan 2020.

"Kegiatan tersebut juga sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat agar ikut membantu dalam pengawasan, sehingga tercipta iklim demokrasi yang bermartabat" Pungkasnya kepada pewarta.

(Humas Bawaslu Pacitan)



Pembentukan Desa Pengawasan Partisipatif

## Bawaslu Pacitan Bentuk Desa Pengawasan Partisipatif

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, Bawaslu Kabupaten Pacitan lakukan Pembentukan Desa Pengawasan Partisipatif dalam rangka Sosialisasi pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Pacitan. Hari pertama kegiatan di laksanakan di Desa Candi Kecamatan Pringkuwu dan Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro pada 12/11/2019. Kemudian dilanjutkan hari kedua di

Desa Purworejo Kecamatan Pacitan dan Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung pada 13/11/2019. Dan hari terakhir di Desa Belah Kecamatan Donorojo pada 14/11/2019.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Pacitan mengatakan bahwa minimnya personel Bawaslu, karena di Kabupaten hanya ada 5 orang di Kecamatan ada 3 serta Desa 1 orang. Dengan minimnya sumber

daya yang ada dalam melakukan pengawasan, maka diperlukan partisipasi warga untuk ikut mengawasi pemilu. Hal ini mempertegas bahwa pengawasan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama, "Dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan rasa kepedulian rasa memiliki, masyarakat dapat berperan aktif terhadap pengawalan proses jalannya demokrasi dan bukan hanya milik Bawaslu saja" Ungkap Sulami selaku Kordiv Pengawasan.

(Humas Bawaslu Pacitan)



### Pengawasan dalam Lensa Kamera



Bawaslu dan KPU saat menerima kunjungan Ketua KPU RI Arif Budiman di Lokasi Wisata Sentono Genthong



Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi atas Laporan Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Pacitan



Bawaslu Pacitan Peduli bencana Kekeringan Dengan Memebrikan 6 Truk Tangki Air Bersih ke Seluruh Wilayah Terdampak



Bawaslu Pacitan Bangun Sinergi dengan Semua Stakeholder Terkait Dalam Melakukan Kerja Kerja Pengawasan

## Kabar Pengawas Kabupaten Pacitan

**Pembina** Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pacitan. **Penanggung Jawab** Koordinator Kesekretariatan. **Pemimpin Redaktur** Imam Syahroni. **Layout & Desain** Aji Setiyawan **Fotografer** Sony Priyunio **Peliputan** Wahyuni **Email Redaksi** [bawaslupacitan@gmail.com](mailto:bawaslupacitan@gmail.com) **Alamat Kantor** Jalan MT. Haryono No. 60 Ploso Pacitan Telp : (0357) 881018